

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

FLEKSIBILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBAYARAN AIR PADA KPPBC TMP B KUALA NAMU

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka¹
Administrasi Perkantoran Bisnis Digital, Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa²
hasiandaulay@gmail.com¹, ramayani.yusuf@poljan.ac.id²

Abstract

Anggaran merupakan salah satu konsep penting yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan untuk menunjang kinerja suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu mulai dari memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran dan juga untuk menjalankan seluruh program kerja yang telah direncanakan oleh instansi pemerintah tersebut. Namun, dengan berbagai kondisi di lapangan, instansi pemerintah pemerintah perlu mengalokasikan anggaran agar seluruh kebutuhan pada instansi pemerintah dapat terpenuhi. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, instansi pemerintah perlu melakukan manajemen anggaran yang baik agar anggaran yang tersedia dapat memenuhi segala kebutuhan dan program kerja yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan KPPBC TMP B Kuala Namu agar anggaran yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung, analisis data, dan studi kepustakaan.

Kata Kunci : *Anggaran, Manajemen, Pemerintah*

Abstrak

Budget is one of the important concepts made by the government in regulating expenditures and revenues to support the performance of a government agency in a certain period starting from meeting the daily operational needs of offices and also to carry out all work programs that have been planned by the government agency. However, with various conditions in the field, government agencies need to allocate budgets so that all needs of government agencies can be met. With existing budget constraints, government agencies need to carry out good budget management so that the available budget can meet all needs and work programs that have been planned. This study aims to find out what steps are taken by KPPBC TMP B Kuala Namu so that the available budget can meet the daily operational needs of the office. The method used in this study is a qualitative descriptive method with direct interview data collection techniques, data analysis, and literature studies.

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Keywords : Budget, Management, Government

PENDAHULUAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC TMP B Kuala Namu mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan pelayanan dan pengawasan pada KPPBC TMP B Kuala Namu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan tersebut, wilayah kerja KPPBC TMP B Kuala Namu meliputi daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kuala Namu, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) terkait Bandara Kuala Namu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai yaitu Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kuala Namu (Pelabuhan Udara).

Menurut Mary Parker Follet, seorang ahli manajemen dan penulis asal Amerika Serikat, dikenal dengan kontribusinya yang revolusioner dalam bidang manajemen. Menurut Follet, manajemen bukanlah hanya sekedar sebuah proses untuk mengatur dan mengontrol orang-orang dalam organisasi, namun lebih dari itu, manajemen adalah seni menciptakan kerja sama yang produktif di antara individu-individu yang bekerja bersama. Menurut Mary Parker Follet dalam Stoner dan Wankel (2001) menjelaskan manajemen sebagai “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang” (*the art of getting things done through people*). Definisi ini menunjukkan bahwa pemimpin/manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas – bukan dengan menjalankan sendiri tugas-tugas tersebut (Adrianus Ginsu, 2019).

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Istilah anggaran pendapatan dan belanja negara (budget) biasanya digunakan menamai perkiraan nominatif daripada semua pengeluaran negara dan alat-alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dan disusun secara sistematis. Dengan demikian, anggaran pendapatan dan belanja itu dirumuskan dalam arti sosial ekonomis sebagai “rencana keuangan” (Prof. Dr. H. Ujjianto, MS, 2017).

Untuk mendukung manajemen anggaran, dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat terlaksana secara optimal. Menurut Surya Dharma (2023), terdapat 10 manfaat strategi bagi organisasi/perusahaan, yaitu:

1. Strategi perusahaan melibatkan semua pihak dalam organisasi/perusahaan, yang mencakup area dan fungsi bisnis;
2. Strategi organisasi/perusahaan berkonsentrasi pada kelangsungan hidup bisnis perusahaan, sebagai tujuan minimal, dan menciptakan nilai tambah, sebagai tujuan maksimal;
3. Strategi organisasi/perusahaan meliputi seluruh dan kedalaman aktivitas organisasi/perusahaan;
4. Strategi organisasi/perusahaan mengarahkan perubahan dan mencakup hubungan antara organisasi/perusahaan dan lingkungannya;
5. Strategi organisasi/perusahaan merupakan pusat bagi pengembangan keunggulan kompetitif organisasi/perusahaan yang berkelanjutan;
6. Pengembangan strategi organisasi/perusahaan merupakan hal yang sangat krusial untuk memicu penjualan, keuntungan, pangsa pasar, dan nilai saham;
7. Mengarahkan keputusan manajerial;
8. Meningkatkan komitmen manajer dan karyawan;
9. Pendekatan umum untuk melaksanakan kebijakan;
10. Antisipasi perusahaan untuk menghadapi masa depan.

Hal yang menjadi penghambat dalam manajemen anggaran yang terjadi pada KPPBC TMP B Kuala Namu setiap tahunnya disebabkan karena terdapat batasan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, hal ini dapat dibuktikan dengan program kerja yang

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

telah direncanakan dan diajukan namun tidak dapat dipenuhi seluruhnya dengan batasan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran yang berada di KPPBC TMP B Kuala Namu untuk mengatasi hambatan terkait batasan pagu anggaran dan bagaimana agar anggaran yang telah disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan KPPBC TMP B Kuala Namu.

Oleh karena itu, melalui penjelasan singkat diatas, peneliti kemudian berniat untuk meneliti lebih luas tentang **"Fleksibilitas Anggaran Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembayaran Air Pada KPPBC TMP B Kuala Namu"**.

METODE

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Syafrida (2022), "metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan sifat penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian" (p.6). Hal tersebut beriringan seiring dengan penelitian kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Subandi (2011) bahwa kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif.

Wiwin Yuliani (2018) mengatakan, deskriptif kualitatif dapat diartikan secara ringkas sebagai suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif yang berarti penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, penelitian metode deskriptif kualitatif sangatlah cocok dengan metode penelitian yang akan saya gunakan dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini, dengan mengacu pada kejadian di lapangan secara nyata dan diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan akurat sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap Kementerian dan Lembaga selalu melakukan penyusunan anggaran setiap tahunnya. Nuramalia (2017) menjelaskan bahwa, anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaan pun pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Menurut Eko Aprilawati (2020), penyusunan anggaran harus berdasar pada target pengeluaran dan pada hasil yang telah diperoleh. Dalam penyusunan anggaran atau yang biasa disebut penyusunan RKA-K/L terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan hingga anggaran terbentuk. RKA-K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing-masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. Dalam proses penyusunan anggaran, terdapat 3 (tiga) kali penetapan untuk Kementerian/Lembaga, yaitu :

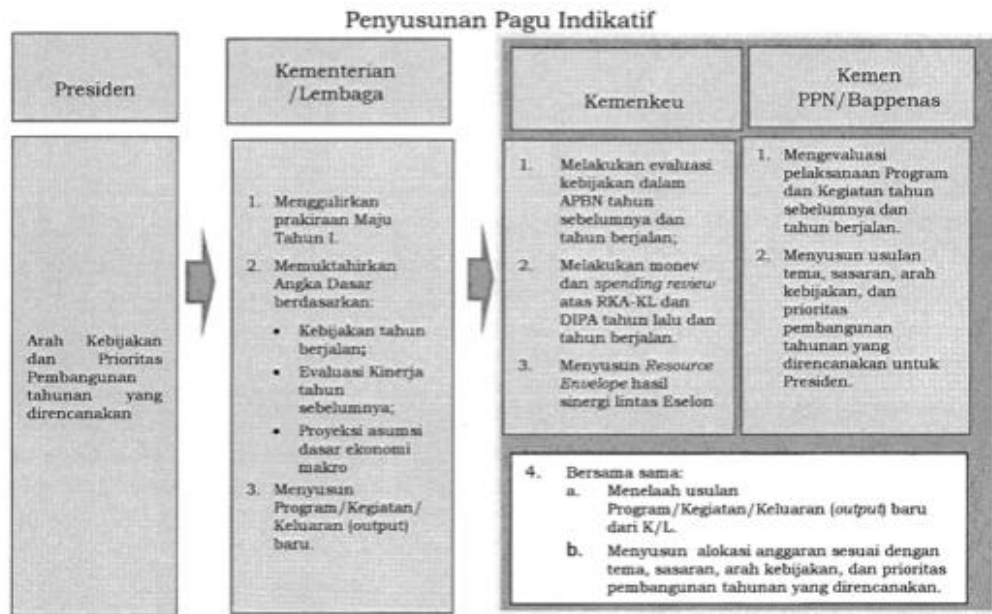
1. Pagu Indikatif

Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan, terdapat beberapa proses yang perlu ditempuh. Adapun proses tersebut yaitu :

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- b. Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
- c. Kementerian/Lembaga memutakhirkan Angka Dasar dan menyusun Prakiraan Maju
- d. Kementerian/Lembaga dapat menyusun rencana Kegiatan/Keluaran baru
- e. Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan tinjau ulang Angka Dasar dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal.
- f. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Pagu Indikatif.

Hasian Ahmady Dauly¹, Ramayani Yusuf²

Proses penyusunan sampai dengan penetapan pagu indikatif di atas dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini :



2. Pagu Anggaran K/L

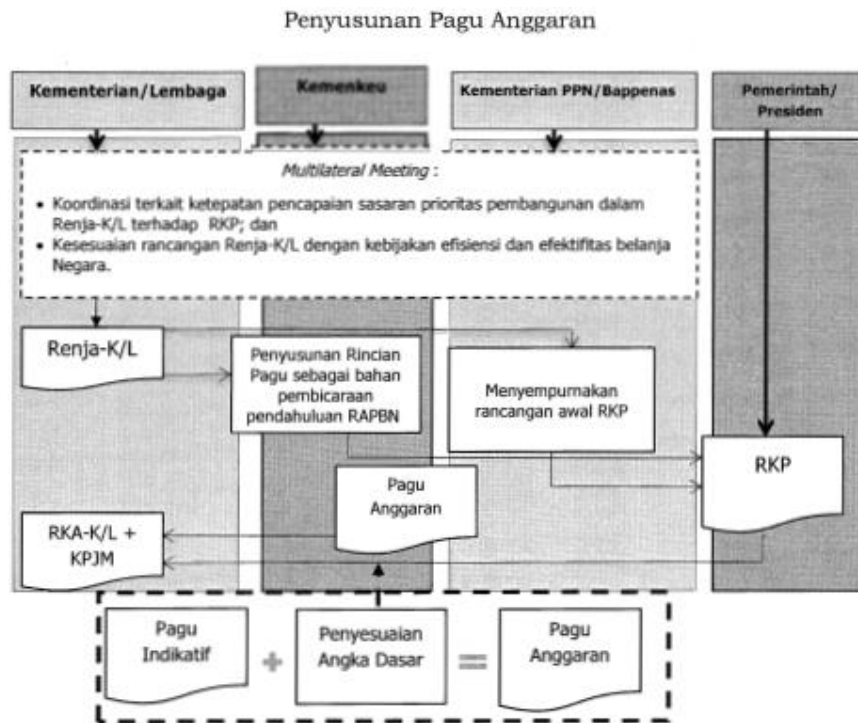
Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L adalah sebagai berikut :

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja-K/L
- b. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*)
- c. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan
- d. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN
- e. Pemerintah menetapkan RKP
- f. Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Pagu Anggaran K/L
- g. Menteri/Pimpinan Lembaga Menyusun RKA-K/L

Hasian Ahmady Dauly¹, Ramayani Yusuf²

- h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran
- i. Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L

Proses penyusunan hingga penetapan pagu anggaran di atas dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini :



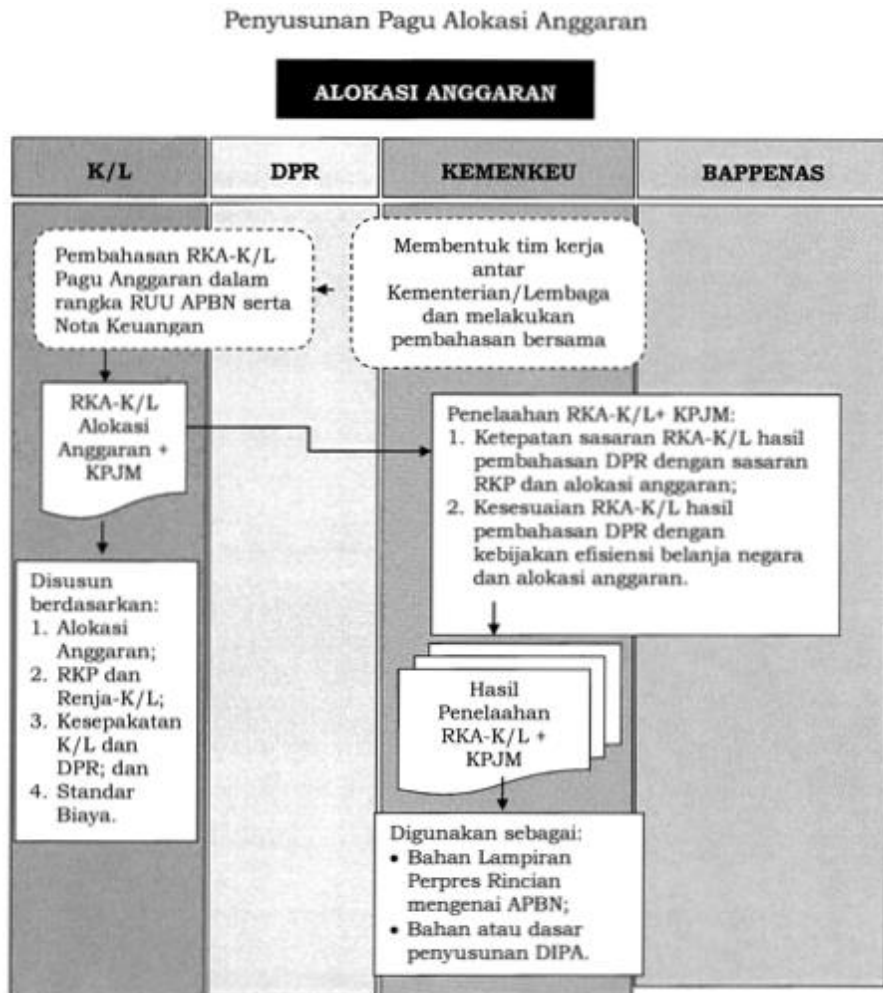
3. Alokasi Anggaran

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L Pagu ANggaran dengan DPR
- b. Menteri/Pimpinan Lemabaga Menyusun RKA-K/L Alokasi ANggaran dengan KPJM
- c. Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran dan KPJM
- d. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Proses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran di atas dapat diilustrasikan dalam skema berikut ini :



Setelah melalui beberapa tahapan tersebut diatas, kemudian ditetapkanlah DIPA yang nantinya dapat digunakan oleh masing-masing instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional kantornya masing-masing. Di KPPBC TMP B Kuala Namu. Ketika DIPA telah diterima, maka akan dilakukan rapat anggaran dengan pengelola keuangan dan perwakilan dari masing-masing seksi yang bertujuan untuk melakukan perencanaan program kerja dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai. Menurut Suhardi

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

(2019), dibutuhkan suatu perencanaan yang matang untuk merealisasikan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dadan (2017) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting untuk dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Adisaputro dan Anggraini (2010) mengungkapkan bahwa kejelasan tujuan anggaran yang spesifik jauh lebih bermanfaat daripada tujuan anggaran yang tidak spesifik dikarenakan hal tersebut dapat memberi dampak kepada para pegawai (Nur, 2021). Setelah dilakukan rapat bersama, tim pengelola keuangan pada KPPBC TMP B Kuala Namu akan menetapkan skala prioritas program kerja mana yang dapat dilaksanakan.

Adapun total anggaran yang dimiliki oleh KPPBC TMP B Kuala Namu dalam periode tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Anggaran DIPA KPPBC TMP B Kuala Namu		
2022	2023	2024
Rp.4.578.693.000	Rp.5.346.678.000	Rp.6.059.356.000

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 KPPBC TMP B Kuala Namu mempunyai anggaran sebesar Rp.4.578.693.000 yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp.5.346.678.000 dan kenaikan juga terjadi pada tahun 2024 menjadi Rp.6.059.356.000. Mengapa terjadi demikian?

Menurut data yang penulis dapatkan bahwa pada tahun 2022, anggaran yang didapatkan sebesar Rp.4.578.693.000, namun pada tahun 2023, anggaran DIPA KPPBC TMP B Kuala Namu mengalami penambahan menjadi Rp.5.346.678.000. Hal ini disebabkan karena terjadi penambahan anggaran pada klasifikasi rincian output komunikasi publik dan layanan dukungan manajemen internal. Penambahan anggaran tersebut disebabkan karena pada tahun 2023, KPPBC TMP B Kuala Namu memiliki rencana untuk melakukan kegiatan Iklan Layanan

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Masyarakat berupa sosialisasi menggunakan sosial media yang bekerja sama dengan influencer dan radio. Sementara pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal, penambahan anggaran tersebut berfokus pada akun belanja keperluan perkantoran, belanja listrik, belanja air, belanja sewa. Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 penambahan anggaran terjadi pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada akun belanja keperluan perkantoran, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja persediaan barang konsumsi, belanja telepon, belanja air, dan belanja sewa. Penulis mendapatkan data bahwa Pengelola keuangan KPPBC TMP B Kuala Namu yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan seluruh pelaksanan di keuangan dan rumah tangga berfokus pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal yang isinya berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional kantor, hal ini disebabkan karena kebutuhan operasional perkantoran merupakan hal yang penting dan krusial guna mendukung segala kegiatan yang dilakukan di KPPBC TMP B Kuala Namu. Salah satunya adalah kebutuhan untuk pembayaran air. Kebutuhan air disetiap kantor merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dan harus tersedia.

Adapun anggaran pembayaran air pada KPPBC TMP B Kuala Namu di awal tahun pada saat DIPA terbentuk dalam periode waktu tiga tahun terakhir sebagai berikut:

DIPA Awal KPPBC TMP B Kuala Namu untuk Pembayaran Air		
2022	2023	2024
Rp.36.000.000	Rp.108.000.000	Rp.132.000.000

Berdasarkan data anggaran tersebut, dapat kita perhatikan bahwa DIPA awal tahun anggaran untuk pembayaran air pada KPPBC TMP B Kuala Namu mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan kenaikan anggaran pembayaran air tersebut.

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Sebelum penulis jelaskan lebih lanjut, berikut merupakan pagu anggaran pada KPPBC TMP B Kuala Namu untuk pembayaran air setelah mengalami revisi anggaran :

DIPA Akhir KPPBC TMP B Kuala Namu untuk Pembayaran Air		
2022	2023	2024
Rp.98.950.000	Rp.123.000.000	Rp.132.000.000

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa DIPA akhir tahun anggaran untuk pembayaran air pada KPPBC TMP B Kuala Namu pada tahun 2022 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.62.950.000. dan pada tahun 2023 pun mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.15.000.000. sementara itu pada tahun 2024, penulis mendapatkan data bahwa belum terjadi penambahan anggaran untuk kebutuhan penambahan air karena pada tahun berjalan memang terkait kebutuhan air ini sudah dianggarkan dan dihitung dengan baik sesuai histori kebutuhan yang ada.

Mengapa terjadi hal demikian? berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pengelola keuangan KPPBC TMP B Kuala Namu, pada tahun 2022, biaya kebutuhan air mengalami pertambahan yang signifikan dimulai karena kurang baiknya perencanaan anggaran untuk kebutuhan air, selain itu memang kebutuhan air meningkat karena terjadi penambahan pegawai pada KPPBC TMP B Kuala Namu sehingga otomatis kebutuhan penggunaan air ini meningkat. Selain itu, penulis temukan pada tagihan pemakaian air periode Agustus 2022 bahwa terdapat tambahan biaya administrasi sebesar 15% dari biaya pemakaian yang menyebabkan bertambahnya biaya kebutuhan penggunaan air kedepannya pada KPPBC TMP Kuala Namu. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 anggaran kebutuhan air pun ditingkatkan untuk memitigasi kurangnya kebutuhan pembayaran air.

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Kondisi yang terjadi tersebut membuat pengelola keuangan pada KPPBC TMP B Kuala Namu harus melakukan diskusi dan rapat anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka pembayaran air. Pada akhirnya pengelola keuangan KPPBC TMP B Kuala Namu melakukan revisi anggaran dengan cara menggeser anggaran pada akun lain ke akun langganan air dengan harus mengorbankan kebutuhan yang bukan menjadi prioritas utama. Dengan demikian dapat terpenuhi pula kebutuhan pembayaran air pada KPPBC TMP B Kuala Namu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Terdapat 3 tahapan dalam proses penyusunan anggaran dimulai dari penetapan sampai dengan terbentuknya anggaran, yaitu :
 - a. Pagu Indikatif
 - b. Pagu Anggaran K/L
 - c. Alokasi Anggaran
2. Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran air, KPPBC TMP B Kuala mengalami beberapa kendala antara lain :
 - a. Belum sempurnanya perencanaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air
 - b. Adanya biaya administrasi yang sebelumnya tidak dikenakan sebesar 15% dimulai pada tagihan air Bulan Agustus 2022
3. Langkah-langkah yang dilakukan pengelola keuangan KPPBC TMP B Kuala Namu dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pembayaran listrik adalah:
 - a. Melakukan mitigasi dengan cara melakukan perhitungan anggaran kebutuhan air dengan matang
 - b. Melakukan revisi anggaran dengan cara menggeser anggaran dari akun anggaran yang berlebih ke anggaran akun pembayaran air

SARAN

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Berikut saran dan rekomendasi yang dapat penulis sampaikan kepada KPPBC TMP B Kuala Namu antara lain :

1. Menetapkan anggaran yang lebih besar untuk anggaran pembayaran air untuk menghindari kekurangan jika ada pemakaian yang tidak diduga
2. Pada tahun berjalan, segera melakukan permintaan tambahan anggaran ke Kantor Pusat DJBC di awal tahun jika memang dirasa anggaran kebutuhan pembayaran air akan kurang sampai dengan akhir tahun setelah dilakukan prognosa realisasi anggaran
3. Menerbitkan nota dinas kepada seluruh pegawai untuk menghimbau agar menggunakan air dengan bijak sehingga tidak terjadi kenaikan pemakaian air karena penggunaan air yang tidak perlu

DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Surya. (2023). Manajemen Kinerja. Penerbit: Universitas Terbuka

Hasanah, Nuramalia., Achmad Fauzi. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Penerbit: In Media

Sahir, Syafrida H. (2022). Metodologi Penelitian. Penerbit: KBM Indonesia.

Suhardi. (2019). Budgeting Perusahaan, Koperasi, dan Simulasinya. Penerbit: Gava Media.

Ujianto (2021). Keuangan Negara. Penerbit: Indomedia Pustaka.

Ginsu, A., Johnny Hanny P., Gustaaf Buddy T. (2019). Manajemen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Aprilawati, El., Wakhid Y., Blandina, H. (2020). Analisis Penyusunan ANggaran Dan Realisasinya Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan Pada PT. Len Railway Systems (LRS) Kantor Cabang Kebumen. *Politeknik Dharma Patria: Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*.

Hasian Ahmady Daulay¹, Ramayani Yusuf²

Ramdhani, Dadan., Indi Zaenur Anisa. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol. 10 No.1.*

Wardani, Nur D., Dewi, S. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya.*

Subandi (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *HARMONIA, Volume 11.*

Yuliani, Wiwin (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta, Volume 2.*